

LAMPIRAN 1

**MASUKAN DAN TANYA JAWAB
DALAM FOCUS GROUP DISCUSSION RPM IPTV
Tanggal 24 Juni 2009**

No	MASUKAN & PERTANYAAN	JAWABAN
1	IM2	
	a. Apakah IPTV sebagai jasa atau penyelenggara jaringan.	Penyelenggara IPTV adalah penyelenggara jasa yang memiliki jaringan sendiri.
	b. Mengapa IPTV tidak merujuk pada KM 21 tentang multimedia ?	KM 21 sudah tidak berlaku sejak tahun 2004. Sehingga Pay TV dalam multimedia harus mengurus perpindahan izinnya menjadi LPB dan harus berbentuk perusahaan yang hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
	c. Kenapa membentuk konsorsium ?	Untuk memudahkan proses pemberian izin tanpa melanggar UU yang telah berjalan (IPTV menyesuaikan UU eksisting)
	d. Jika IPTV merupakan konvergensi, mengapa nirkabel ditunda ?	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika nirkabel dilaksanakan saat ini, dikhawatirkan frekuensi BWA akan digunakan untuk layanan IPTV sehingga tujuan pemanfaatan BWA untuk perluasan internet tidak tercapai. 2. BWA secara teknis pada saat ini sulit menjamin kecepatan minimum 2Mbps untuk tiap pelanggan. 3. Hampir seluruh layanan IPTV komersial di dunia masih menggunakan jaringan kabel. 4. Diharapkan setelah konvergensi UU Komunikasi dan Informatika ditetapkan diharapkan IPTV melalui jaringan nirkabel dapat diselenggarakan.
	e. Konsorsium dalam RPM seolah-olah tidak berbadan hukum ? Hal ini berbeda dengan aturan dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa meskipun bentuknya konsorsium namun izin penyelenggaraan IPTV diberikan kepada ketua

No	MASUKAN & PERTANYAAN	JAWABAN
	frekuensi. Apakah PKS cukup kuat ?	<p>konsorsium yang berbadan hukum</p> <p>2. PKS tidak cukup kuat karena yang diikat dalam izin penyelenggaraan hanya pihak pertama pada PKS. Sehingga pertanggung jawaban tidak dijamin oleh semua pihak pada PKS.</p>
2	PT. TELKOM	
	a. Apakah TKDN IP-STB mampu mencapai 20% ? apakah bisa ditunda 1 thn setelah izin penyelenggaraan diperoleh ?	Tidak bisa, karena IP-STB bukan merupakan teknologi yang sulit untuk dikuasai dan pada saat ini industri dalam negeri sudah mampu memproduksi IP-STB dengan TKDN 20%.
		Sambil menunggu kesiapan manufaktur dalam negeri diperbolehkan menggunakan IP-STB impor pada waktu uji coba, tetapi pada saat operasional secara komersial diwajibkan menggunakan IP-STB dalam negeri dengan TKDN minimal 20%
	b. Apakah suatu keharusan untuk migrasi dari IPv4 ke IPv6 dalam waktu 2 tahun ? Bagaimana jika keputusan migrasi diserahkan pada operator berdasarkan kebutuhan ?	Harus, sehubungan dengan harapan bahwa IPTV dapat menjadi <i>vehicle</i> menuju teknologi masa depan. Dikaitkan dengan rencana migrasi ke NGN harus dilaksanakan pada tahun 2012. Bahwa mulai tahun 2011 semua IP yang baru harus menggunakan Ipv6
3	PANGGUNG ELEKTRONIK	
	a. Setuju, dengan kebijakan IP-STB yang memberikan kesempatan pertumbuhan industri dalam negeri	Terima kasih atas kesiapannya, sebaiknya sesegera mungkin melakukan kerjasama dengan calon penyelenggara.
	b. Apakah IP-STB harus mendapat sertifikasi dari TKDN, Postel, dan SNI.	Pada dasarnya regulasi IPTV disusun dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses sertifikasi tetap seperti yang berlaku saat ini.

No	MASUKAN & PERTANYAAN	JAWABAN
4	MASTEL	
	a. Apa yang dimaksud menjamin ketersediaan IP-STB pada pasal 14 ?	Penyelenggara IPTV harus menjamin kualitas layanannya sampai penerimaan pada pesawat TV pelanggan.
	b. Bagaimana jika dikaitkan dengan liberalisasi ? Bolehkah pembeli membeli sendiri di pasaran ?	Akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RPM. Tetapi terkait dengan jaminan kualitas layanan yang harus diberikan oleh penyelenggara, dikhawatirkan apabila pelanggan menyediakan STB sendiri maka penyelenggara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan pertimbangan ini maka dalam RPM, penyelenggara harus menyediakan IP-STB untuk pelanggannya.
	c. Bagaimana menjamin keamanan pada transaksi elektronik ?	Telah diatur pada Pasal 9 ayat 3 : Untuk dapat memberikan layanan transaksi elektronik, penyelenggara harus terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk adanya CA (Certification of Authority)
	d. Bagaimana keterkaitan konten provider dalam pasal 25 tentang Kontribusi pada negara dan masyarakat ?	PNBP dan USO adalah berdasarkan traffic. BHP dikenakan pada revenue dari traffic yang dihasilkan tidak mempertimbangkan asal trafficnya. Perhitungan rincinya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5	INTI	
	a. Apakah sudah ada standarisasi IP-STB ?	Belum, sesegera mungkin akan dibuat setelah RPM disetujui.
6	BIZNET	
	a. Bukankah jika penyelenggara harus merupakan badan hukum ?	a. Penyelenggara memang merupakan badan hukum, karena izin diberikan kepada ketua konsorsium.
	b. Apakah suatu anggota bisa bertanggungjawab terhadap UU yang dikenai terhadap	b. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota

No	MASUKAN & PERTANYAAN	JAWABAN
	anggota lain ?	<p>konsorsium harus tertuang secara jelas dalam nota kesepahaman pembentukan konsorsium.</p> <p>c. Prosentase masing-masing anggota konsorsium diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan pembentukan konsorsium.</p> <p>d. Konsorsium adalah untuk memudahkan proses pemberian izin.</p> <p>e. Apabila anggota konsorsium memandang perlu, maka perjanjian konsorsium dapat diwujudkan menjadi suatu badan hukum baru.</p>
c.	Bagaimana perhitungan prosentase dalam konsorsium ?	
d.	Konsorsium tidak bisa digunakan seterusnya karena tidak berbadan hukum.	

Catatan :

- Masukan-masukan dan jawaban diatas dipergunakan sebagai bahan penyusunan RPM (Rancangan Peraturan Menteri) yang akan dikaji lebih lanjut oleh Tim Legal.

LAMPIRAN 2

KARAKTERISTIK REGULASI IPTV DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA

KARAKTERISTIK	AUSTRALIA	PERANCIS	JERMAN	HONGARIA	JEPANG	KOREA	BELANDA	INGGRIS	AMERIKA SERIKAT
LISENSI	Tidak membutuhkan izin penyiaran	Penyiaran	Telekomunikasi	Penyiaran	Penyiaran	konvergensi izin penyiaran dan telekomunikasi	Telekomunikasi	Penyiaran	Telekomunikasi Untuk IPTV belum ada regulasinya
INFRASTRUKTUR TRANSMISI	internet	wireline, satelit, internet, ADSL, seluler	VDSL, FO	wireline	wireline, HFC	wireline	wireline	HFC, FO, wireline, seluler	wireline, wireless,
LAYANAN	IPTV	Personal Video Recorder, video internet, broadcast TV	IPTV	IPTV merupakan broadcast distribution	live TV multicast	IPTV	IPTV	IPTV dan Mobile TV	Open Video System dan video programming IPTV

